



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.403429/2025**



DS:0215-9845-1121-7772

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
4. Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
- Sebesar : Rp. 53.385.000 ( LIMA PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 53.385.000
005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 53.385.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	53.385.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 53.385.000

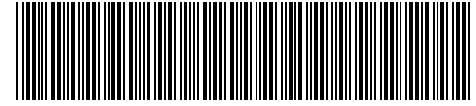
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



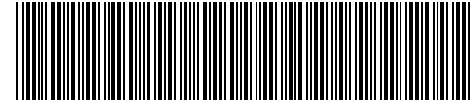
DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					53.385.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					53.385.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara					
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara					
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara					
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara					
		5. 02	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum					
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan					
		7. 03	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN					
		8. 04	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi		1,00	kegiatan		2.480.000
Rincian Output	:	01	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara		1,00	kegiatan		2.480.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		1,00	Perkara, Berkas Perkara		405.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		1,00	Perkara		405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		96,00	Orang		33.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)		96,00	Orang		33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		1,00	Perkara, Berkas Perkara		17.500.000
Rincian Output	:	01	QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)		1,00	Perkara		17.500.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : I A. 2

Perkara Hukum Perseorangan

Perkara, Berkas Perkara

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

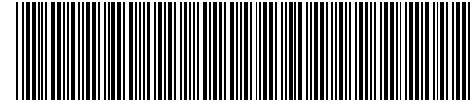
ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0215-9845-1121-7772

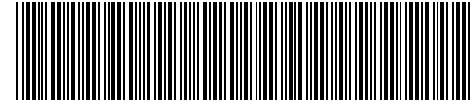
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
 Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
 Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	53.385.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	53.385.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



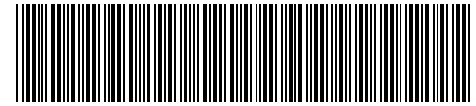
DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	-	53.385	-	-	-	53.385		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	53.385	-	-	-	53.385		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	53.385	-	-	-	53.385		
1059.AEA	Koordinasi (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	2.480	-	-	-	2.480	30.51	
01	RM	-	2.480	-	-	-	2.480	015	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	405	-	-	-	405	30.51	
01	RM	-	405	-	-	-	405	015	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	33.000	-	-	-	33.000	30.51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	015	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)	-	17.500	-	-	-	17.500	30.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG  
Kewenangan : (KD)

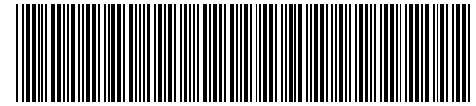
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	17.500	-	-	-	17.500	015@	
<b>JUMLAH</b>		-	53.385	-	-	-	53.385		

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403429	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	2.400	2.800	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	21.105	3.280	2.800	5.800	53.385
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	2.400	2.800	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	21.105	3.280	2.800	5.800	53.385
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	2.400	2.800	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	21.105	3.280	2.800	5.800	53.385
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	2.400	2.800	3.200	3.200	3.200	2.800	2.800	21.105	3.280	2.800	5.800	53.385
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	455	5.251
		- PNB (425232)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	41	470
		- PNB (425233)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	123	1.410
		- PNB (425239)	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	291	3.371

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

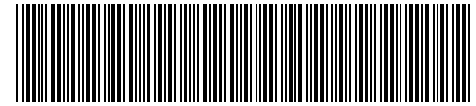
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
403429	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG</b> Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 8.600 52 Belanja Barang Rp. 8.600		
005.05.BF 1059	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b> <b>Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara</b>		
1059.QCA	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b> 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:0215-9845-1121-7772

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG  
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.  
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.  
NRP. 525775